

Bab V

No. _____

Date: _____

"Integrasi Nasional dalam Bingkai"

Bhinneka Tunggal Ika

=> A. Kebhinekaan Bangsa Indonesia

Kebhinnekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat di Pungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya Perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Selain Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", negara kita juga memiliki alat-alat Pemersatu bangsa sebagai berikut.

1. Dasar Negara Pancasila

2. Bendera Merah Putih sebagai bendera Kebangsaan

3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Persatuan

4. Lambang Negara Burung Garuda

5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

6. Lagu - lagu Perjuangan

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya Perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman Suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap Wilayahnya.

Jika Perselisihan diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan hukum, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian Permasalahan dan Perselisihan bisa di hindari

☐ dengan memberikan Perlindungan Secara Penuh kepada
☐ Setiap Warga negara.

☐ ⇒ B. Pentingnya konsep Integrasi Nasional

☐ 1. Pengertian Integrasi Nasional

☐ Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu "Integrasi"
☐ dan "nasional". Integrasi berasal dari bahasa Inggris, Integrate,
☐ artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan.
☐ Dalam KBBI, integrasi artinya Pembauran hingga menjadi
☐ satu kesatuan yang bulat dan utuh. kata nasional dari
☐ bahasa Inggris, Nation yang artinya bangsa. Dalam KBBI
☐ integrasi nasional mempunyai arti Politis dan antropologis.

☐ a. Secara Politis

☐ Integrasi nasional Secara Politis berarti Penyatuan
☐ berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan
☐ wilayah nasional yang membentuk Suatu identitas nasional.

☐ b. Secara Antropologis

☐ berarti Proses Penyesuaian di antara unsur-unsur
☐ kebudayaan yang berbeda Sehingga mencapai Suatu
☐ keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

☐ Berikut adalah Pendapat Para ahli tentang Integrasi

☐ 1. Howard Antropologis

☐ Integrasi bangsa berarti Penyatuan bagian yang
☐ berbeda-beda dari Suatu masyarakat menjadi Suatu
☐ keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan

☐ masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

☐ 2. Myron Weiner

☐ Integrasi menunjuk pada Proses Penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional.

☐ 3. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

☐ Integrasi nasional ini sebagai Proses Penyatuan sebuah / Suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya.

☐ 4. J. Soedjati Djiwandono

☐ Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian Persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri.

☐ 2) Syarat Integrasi

☐ Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut.

☐ a. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya

☐ b. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang di lestarikan dan di jadikan Pedoman.

☐ c. Norma² dan nilai² sosial di jadikan aturan baku dalam

☐ masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

☐ 2. Myron Weiner

☐ Integrasi menunjuk pada Proses Penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional.

☐ 3. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

☐ Integrasi nasional ini sebagai Proses Penyatuan sebuah / Suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya.

☐ 4. J. Soedjati Djiwandono

☐ Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian Persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri.

☐ 2) Syarat Integrasi

☐ Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut.

☐ a. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya

☐ b. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang di lestarikan dan di jadikan Pedoman.

☐ c. Norma² dan nilai² sosial di jadikan aturan baku dalam

☐ nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan
☐ tujuan Pertahanan negara, yang di tempuh dengan tiga
☐ starta Pendekatan

☐ => E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan
☐ dan Kesatuan Bangsa

☐ 1.) Kesadaran Warga Negara

☐ kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat
☐ membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak
☐ atau tidak, Patut atau tidak Patut dalam berkata dan
☐ berperilaku.

☐ 2.) Pengertian Bela Negara

☐ Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia
☐ Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Pertahanan
☐ negara, Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku
☐ Warga negara yang di jiwai kepada NKRI berdasarkan
☐ Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, dalam menjamin
☐ kelangsungan hidup bangsa dan negara.

☐ Pengertian Sederhana dari ancaman, tantangan, hambatan,
☐ dan gangguan adalah sebagai berikut.

☐ 1. Ancaman adalah usaha yang bersifat merombak atau
☐ mengubah kebijaksanaan yang di lakukan secara
☐ konsepsional melalui tindakan kriminal dan Politis.

☐ 2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan
☐ untuk menggugah kemampuan.

3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional

4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional (tidak terarah)

3). Dasar Hukum Bela Negara.

Dasar hukum dan bela negara.

a. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional

b. Undang Undang RI Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok² Perlawanan rakyat.

c. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, di ubah oleh

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1998

d. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI

4) kesediaan Warga negara untuk melakukan bela negara

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara Pasal 9 ayat 2, di tegaskan berbagai bentuk usaha Pembelaan negara

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang ~~Sisdiknas~~ Sisdiknas, di jelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan

☐ Pelajaran Wajib yang diajarkan di tingkat Pendidikan dasar, menengah, dan tingkat Pendidikan tinggi.

☐ b. Pelatihan dasar kemiliteran

☐ Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat Pelatihan dasar militer adalah siswa Sekolah menengah dan unsur mahasiswa

☐ c. Pengabdian Sebagai Tentara Nasional Indonesia

☐ Pasal 30 ayat 2 Tahun 1945 menyebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha Pertahanan dan keamanan rakyat.

☐ d. Pengabdian Sesuai dengan keahlian atau Profesi

☐ Pengabdian sesuai dengan Profesi adalah Pengabdian warga negara untuk kepentingan Pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan ~~dan~~ memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh Perang, bencana alam, atau bencana lainnya.